



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**TRIWULAN II
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public. Pelaksanaan SAKIP menempatkan kinerja sebagai salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengukuran dan pemantauan kinerja yang dilaksanakan secara terukur, berkala, dan berkesinambungan.

Salah satu instrumen penting dalam pengukuran kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Melalui IKU, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai berdasarkan hasil yang ingin dicapai, bukan semata-mata berdasarkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan IKU sebagai bagian dari dokumen perencanaan dan kinerja Tahun 2026. IKU tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja Tahun 2026 berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi IKU secara triwulanan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja pada periode berjalan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian target, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai perkembangan

pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pengendalian oleh pimpinan dalam menentukan kebijakan dan langkah perbaikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi IKU Triwulanan Tahun 2026 tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan administrasi pelaporan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengendalian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Monitoring dan Evaluasi IKU Triwulanan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2026. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. mengetahui perkembangan pencapaian IKU secara berkala;
2. membandingkan target dengan realisasi kinerja;
3. mengidentifikasi tingkat keberhasilan pencapaian IKU;
4. mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja;
5. mengetahui permasalahan yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target tahunan;
6. menyediakan informasi kinerja bagi pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan;
7. merumuskan langkah perbaikan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi; dan
8. memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tetap mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan SAKIP. Perencanaan kinerja disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan. Perencanaan tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga setiap sumber daya yang digunakan dapat diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan kinerja tidak berhenti pada tahap penetapan target, tetapi dilanjutkan dengan proses pengukuran dan evaluasi secara berkala. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana target kinerja dapat dicapai serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kesenjangan antara target dan realisasi.

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2026, yaitu:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2026
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	82,48
2.	Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	78,15
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	6,6

Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung terciptanya kondisi kehidupan demokrasi, harmonisasi kehidupan masyarakat, serta kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi demokrasi. Dalam konteks pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pencapaian indikator ini didukung melalui berbagai upaya pembinaan kehidupan demokrasi, pendidikan politik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menggambarkan kondisi harmoni dalam kehidupan masyarakat. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan toleransi, fasilitasi komunikasi sosial, pencegahan potensi konflik, serta koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indikator yang berkaitan dengan kondisi kerukunan kehidupan beragama. Pencapaian indikator tersebut didukung melalui kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, peningkatan toleransi, fasilitasi komunikasi antarumat beragama, serta koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait.

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI IKU

3.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi IKU dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta data kinerja yang berkaitan dengan pencapaian IKU. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengukuran untuk memastikan kesesuaiannya dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada periode berjalan. Apabila terdapat indikator yang belum sesuai dengan target, dilakukan identifikasi terhadap faktor penyebab dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya dirumuskan langkah tindak lanjut sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.

3.2 Hasil Pengukuran IKU

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026, IKU belum dapat diukur secara final pada setiap triwulan karena periode pengukuran IKU dilakukan secara tahunan. Namun demikian, perkembangan pencapaian IKU tetap dipantau melalui capaian program dan kegiatan yang mendukung IKU. Pemantauan dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan target dan realisasi program, sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja, tingkat pencapaian target, serta hambatan dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pencapaian IKU tahunan. Adapun capaian kinerja pelayanan yang mendukung IKU yaitu:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Satuan	Target	Capaian s.d TW II	Keterangan
1.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	78,5	78,5	Tercapai
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	%	80	80	Tercapai
3.	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	%	5	5	Tercapai
4.	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Fasilitasi Kerukunan yang Dilaksanakan	%	100	100	Tercapai
5.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	80	80	Tercapai

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN, FAKTOR PENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT

4.1 Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan pencapaian IKU Tahun 2026 terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kinerja, antara lain:

1. adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pencapaian kinerja;
2. tersedianya dokumen perencanaan dan target kinerja sebagai pedoman pelaksanaan;
3. adanya koordinasi dan sinergi antarbidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait;
5. tersedianya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis;
6. adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala;
7. adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan kinerja.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKU, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah karakteristik IKU yang bersifat outcome dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, sehingga pencapaiannya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh perangkat daerah. Selain itu, beberapa data indikator membutuhkan proses pengumpulan, pengolahan dan verifikasi dari sumber data terkait. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi yang baik agar data kinerja yang digunakan dalam pengukuran dapat tersedia secara tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan pemanfaatan data hasil pengukuran sebagai bahan pengambilan keputusan. Oleh

karena itu, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara konsisten dan hasilnya perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode berikutnya.

4.3 Upaya yang Dilakukan

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. meningkatkan koordinasi antarbidang dalam pengumpulan dan penyediaan data kinerja;
2. melakukan verifikasi terhadap data yang digunakan dalam pengukuran IKU;
3. melaksanakan monitoring kinerja secara berkala;
4. melakukan evaluasi terhadap capaian dan permasalahan yang ditemukan;
5. meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
6. mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU;
7. menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan pengendalian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tetap mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Pada Tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tiga IKU, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan target 82,48, Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) dengan target 78,15, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan target 6,6. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan untuk mengetahui perkembangan pencapaian masing-masing indikator, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala, serta menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pelaksanaan monitoring secara berkala juga memberikan manfaat dalam memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja. Dengan adanya proses pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan, diharapkan pencapaian target kinerja Tahun 2026 dapat terus ditingkatkan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. meningkatkan konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi IKU secara berkala;

2. meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyediaan data kinerja;
3. meningkatkan koordinasi antarunit kerja dan pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian IKU;
4. menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan;
5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi pada setiap triwulan;
6. memperkuat dokumentasi dan penyimpanan bukti dukung pengukuran kinerja;
7. melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap efektivitas program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Triwulan II Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian terhadap pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai perkembangan pencapaian IKU serta menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan langkah perbaikan pada periode berikutnya. Hasil monitoring dan evaluasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP, khususnya dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut perbaikan.

Dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pencapaian kinerja serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkualitas, harmonisasi masyarakat, dan kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 5 Agustus 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya

Pembina Utama Madya IV/d

NIP. 197106031991011002

